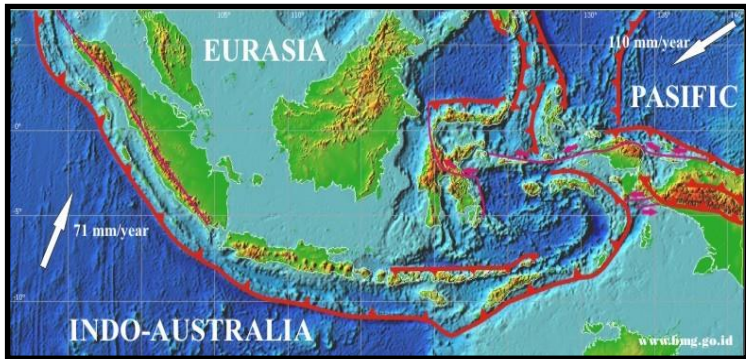


RELAWAN BENCANA; PARTISIPASI, KOMUNIKASI DAN PELEMBAGAAN

Ade Chandra dan R. Ardian Dwi Roy Subekti

PENDAHULUAN

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan bentukan pertemuan tiga lempeng tektonik dunia (world No 13 lempeng tektonik), yaitu lempeng Indo-Australia (selatan), dari barat lempeng Samudra Pasifik (barat) dan dari utara lempeng Eurasia (*continental shelf*). Simpul pertemuan itu kemudian menghasilkan tiga lempeng tektonik (garis merah) yang menimbulkan gempa bumi dan gunung berapi. Berdasarkan pemantauan Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi bencana Geologi (ESDM), saat ini terdapat 129 gunung berapi aktif di Indonesia. Khusus lempeng tektonik dipantau oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang akan segera memberikan informasi tentang gempa dan tsunami.



Daftar panjang perjalanan bencana alam yang melanda ibu pertiwi antara lain gempa bumi-Tsunami di Aceh pada 2004, Gempa Bantul 2006, letusan Gunung Merapi Sleman Yogyakarta pada tahun 2010, Gempa-Tsunami Lombok tahun 2018 yang diikuti oleh pencairan Palu-Sigi-Kabupaten Donggala Sulawesi Tenggara. Setiap jenis bencana tersebut memberi pelajaran berharga terkait fase tanggap darurat, fase transisi dalam pemulihan dan rehabilitasi. Pasca bencana alam hal klasik yang terjadi adalah situasi berantakan, kekacauan terjadi di semua sektor, semua dalam situasi gawat darurat. Beberapa hal misalnya dalam kasus bencana alam, semua akses, jalur transportasi, infrastruktur komunikasi dan sejumlah aspek lain tidak dapat berfungsi. Situasi ini biasa disebut fase perubahan ke keadaan baru akibat bencana yang terjadi.

Gambar 1.1 Model Manajemen Bencana



Sumber: Aditya, Barry, et al (2009: 20)

Paradigma kebencanaan di Indonesia mulai berubah, dari sekedar penanganan ketika terjadi bencana saja menjadi penanggulangan yang lebih preventif atau pencegahan. Dengan kata lain, penanganan bencana kini memiliki pola baru mulai dari pra bencana, tahap bencana serta rehabilitasi setelah bencana. Menurut Kartasasmita, perencanaan disini memberikan kesempatan untuk mengembangkan prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh, di mana partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam hal ini harus terus difasilitasi dan diberdayakan jadi mudah-mudahan mereka memiliki kesadaran dan kebutuhan akan pentingnya penanggulangan bencana (Ahdi, 2015). Dalam undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 Pasal 33 penanggulangan Bencana menyatakan bahwa manajemen

bencana juga dibagi menjadi tiga tahap, yaitu pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

Undang-Undang No. 24 tahun 2007 Pasal 35 menyatakan bahwa dalam keadaan bencana meliputi perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, integrasi ke dalam perencanaan pembangunan, persyaratan analisis risiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan dan pengelolaan bencana teknis persyaratan standar. Pada pasal 48 di dalam UU yang sama disebutkan bahwa saat tanggap darurat meliputi penilaian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya, penentuan status tanggap darurat, penyelamatan dan evakuasi penduduk yang terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, dan pemulihan dengan segera prasarana penting dan istimewa. Sedangkan Pasal 57 menyatakan bahwa pasca bencana tahap meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi.

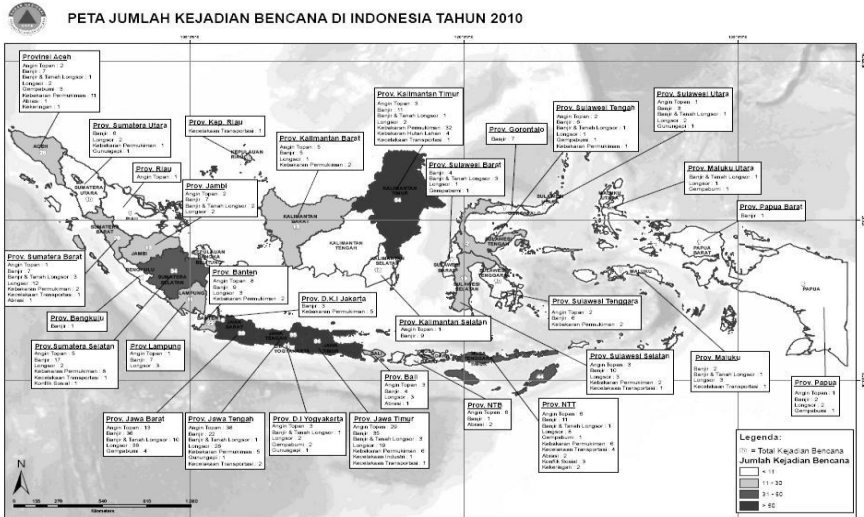
Pemerintah sebagai pengampu kebijakan penanggulangan bencana jelas tidak dapat bekerja sendiri tapi dapat melibatkan unsur mitigasi bencana yang potensial, yakni masyarakat. Dalam hal ini partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana adalah siklus alam yang harus terlibat dalam rangka untuk mempercepat pemulihan dari bencana. Dalam rangka mengoptimalkan peran masyarakat perlu proses pengembangan dan pengorganisasian manusia di semua aspek kehidupan masyarakat, sehingga tercapai output baik dalam kuantitas dan kualitas dengan tujuan risiko

bencana bagi masyarakat dapat diminimalisir.

Grafik 1.b

Peta dari Total Bencana di Indonesia Tahun 2010

Sumber: geospasial.bnpb.pergi.id



Kabupaten Sleman Yogyakarta memiliki riwayat atau pengalaman bencana alam yang cukup lengkap. Pemerintah Daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD Sleman) telah memetakan daerah rawan bencana alam karena berada di daerah Gunung Merapi aktif. Potensi bencana lainnya di Sleman adalah bahaya kekeringan, angin kencang dan sebagainya. Fakta itu kemudian mendorong sejumlah relawan bencana di Sleman untuk membantu menangani bencana alam dengan membentuk organisasi kemasyarakatan berbasis penanggulangan bencana.

Motivasi membentuk organisasi relawan bencana alam berbasis masyarakat dimaksudkan untuk mengambil bagian dalam penanggulangan bencana di wilayah Sleman khususnya dan DIY pada umumnya. Modalitas gotong royong masyarakat dan semangat kemandirian yang dibalut budaya Jawa turut memperkuat kehendak bersama membentuk organisasi sosial yang didasarkan pada kemanusiaan. Kekuatan internal seseorang akan terdorong untuk bertindak ke arah tujuan yang diinginkan. Singkatnya, motivasi adalah tentang bagaimana perilaku seseorang dimulai, memungkinkan, mendukung, diarahkan dan berhenti (Andre Hardjana, 2019).

Pada tanggal 4 Desember 2016 Menteri Sosial RI Kofifah Indar Parawansa untuk memberikan apresiasi besar kepada para relawan DIY sebagai relawan negara. Penghargaan tersebut bukan tanpa alasan sebab dianggap cepat dalam penanganan bencana alam. Saat itu Kofifah mengatakan bahwa orang-orang Yogyakarta memiliki sikap bersama dan gotong royong yang atas kondisi kemanusiaan dalam keadaan bencana alam. Hal itu dibuktikan pada bencana gempa bumi pada tahun 2006 dan meletusnya Gunung Merapi pada tahun 2010 (detiknews.2016). Kunci penanganan bencana bukan terletak pada pemerintah semata, namun keterpanggilan sejumlah orang di masyarakat untuk membantu secara cepat mengelola keadaan akibat bencana alam. Para relawan penanggulangan bencana Yogyakarta merupakan gabungan relawan yang berasal dari komunitas-komunitas kebencanaan yang sebelumnya bergerak secara independen dan mandiri. Di Kabupaten Sleman

Komunitas Relawan Bencana tersebar di desa-desa yang pernah mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Sebagian besar personilnya sudah tergabung dalam wadah yang Komunitas Relawan Forum Komunikasi Sleman (FKKRS); wadah yang lahir karena dorongan rasa kemanusiaan dan empati. Forum ini menampung kepentingan relawan dan intens berkomunikasi dengan berbagai organisasi masyarakat, baik secara langsung atau tidak langsung. Organisasi realawan tersebut awalnya memainkan peran sebagai penghubung antara pemerintah, organisasi dan masyarakat. Selain itu, FKKRS juga melakukan transformasi kepada para relawan di berbagai komunitas agar ke depan kerja-kerja kemanusiaan dalam penanggulangan bencana di DIY makin efektif dan bertenaga secara kolaboratif.

Sinergisitas komunitas relawan ini membantu upaya percepatan penanggulangan bencana dengan meningkatkan kapasitas bersama pemerintah kabupaten dalam fungsi pengendalian, monitoring dan evaluasi fase pra bencana. Pemda melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pribadi dan kapasitas organisasi masyarakat dengan melibatkan relawan masyarakat dalam bentuk pelatihan, pendidikan, dan kegiatan lain yang terkait dengan bencana.

KAJIAN KOMUNIKASI ORGANISASI

Komunikasi oleh Carl Hovland, Janis dan Kelley (Riswandi 2009) dikatakan sebagai suatu proses dimana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk kata-kata dalam rangka untuk mengubah atau membentuk perilaku orang-orang lainnya (khalayak). Komunikasi menekankan tujuan komunikasi untuk mengubah atau membentuk perilaku. Selain itu, komunikasi didorong oleh kebutuhan untuk mengurangi ketidakpastian, bertindak secara efektif, mempertahankan atau memperkuat ego.

Dari berbagai definisi ilmu komunikasi di atas dapat diketahui bahwa makna komunikasi menekankan arti, ruang lingkup dan konteks yang berbeda. Fungsi komunikasi adalah potensi yang dapat digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Dari pengertian komunikasi, tujuan komunikasi menurut Effendy (2003), ada empat tujuan komunikasi, yaitu:

1. Perubahan sikap (*attitude change*); Seorang komunikan setelah menerima pesan kemudian sikapnya berubah, baik positif maupun negatif. Dalam berbagai situasi kita berusaha mempengaruhi sikap orang lain dan berusaha untuk membuat orang lain bersikap positif sesuai keinginan kita.
2. Perubahan pendapat (*opinion change*); dalam mencoba untuk menciptakan pemahaman tentang komunikasi. Pemahaman adalah kemampuan untuk secara akurat memahami pesan seperti yang dimaksudkan oleh komunikator. Setelah anda

memahami apa yang dimaksudkan komunikator akan membuat pendapat yang berbeda kepada komunikan.

3. Perubahan perilaku (*behavior change*); komunikasi yang bertujuan untuk mengubah perilaku atau tindakan seseorang.
4. Perubahan sosial (*social change*); membangun dan memelihara hubungan dengan orang lain untuk menjadi semakin baik hubungan. Dalam proses komunikasi yang efektif secara tidak sengaja meningkatkan kadar hubungan interpersonal.

Dalam proses komunikasi sering ditemukan hambatan, yakni :, ada tiga jenis hambatan dalam komunikasi, yaitu:

1. Pribadi hambatan komunikasi gangguan yang berasal dari emosi seseorang, nilai-nilai, dan buruk kebiasaan mendengarkan.
2. Hambatan fisik yang gangguan komunikasi yang terjadi dalam lingkungan di mana komunikasi berlangsung. Fisik yang khas gangguan adalah mengganggu kebisingan tiba-tiba mengaburkan pesan suara.
3. Semantik hambatan yang berasal dari keterbatasan dari simbol-simbol yang kita gunakan untuk berkomunikasi. Simbol biasanya memiliki arti yang berbeda, dan kita harus memilih salah satu dari banyak makna. Kadang-kadang kita salah memilih makna dan ada kesalahpahaman (Newstrom dan Davis dalam Kaswan, 2012).

Organisasi-organisasi yang secara harfiah berarti perpaduan dari bagian-bagian yang saling bergantung satu sama lain. Menurut Rogers dan Rogers organisasi sebagai suatu struktur yang menetapkan proses pencapaian tujuan yang ditetapkan di mana operasi dan interaksi di antara bagian-bagian dengan masing-masing lain dan manusia yang satu dengan yang lainnya bekerja secara harmonis, dinamis, dan tentu saja (Effendy, 2017).

Dalam keadaan akibat bencana alam, manajemen komunikasi adalah suatu usaha yang komprehensif untuk mencegah dan mengurangi risiko-risiko bencana dengan mengelola proses produksi pesan-pesan atau informasi tentang bencana, penyebaran pesan dan menerima pesan dari tahap pra-bencana, bencana dan pasca bencana terjadi.

Komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam penanggulangan bencana, terutama untuk sinergi antara kebijakan pemerintah dan program-program dari organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Sementara komunikasi dengan masyarakat yang terkena dampak bencana untuk mempercepat proses penanggulangan bencana dengan melibatkan sumber daya lokal, terutama para pemimpin opini.

Dalam tahap penilaian kondisi darurat proses mengumpulkan informasi atau data yang dilakukan secara sistematis atau yang disebut penilaian. Selain itu, para pejabat akan menganalisis situasi untuk menentukan dan menilai kondisi korban yang rusak ringan, sedang, atau berat serta jumlah yang mati, sakit parah, cahaya, dan

sebagainya. Pada tahap ini, proses komunikasi antara petugas dengan masyarakat di daerah bencana, komunikasi dengan pejabat pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan

Wadah Forum Komunikasi Masyarakat Relawan (FKKRS) Sleman berfokus kegiatan di Kabupaten Sleman dan sekitarnya. Saat ini menempati ruang sekretariat utara Lt. 1 Kantong Pos Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman, yang terletak di Jalan Kaliurang KM. 17 Pakem Sleman, hingga sekarang terdiri dari 53 anggota masyarakat relawan Sleman semua termasuk dalam pengumpulan data pada 2019. Komunitas relawan Forum Komunikasi didirikan pada 2015 Sleman di, Sleman. Komunitas relawan Forum Komunikasi Sleman adalah relawan organisasi masyarakat yang diakui dan disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Bpbd Sleman sebagai satu-satunya forum resmi untuk masyarakat relawan yang berada di kabupaten Sleman Relawan Komunikasi Masyarakat Sleman. Forum organisasi sosial yang didasarkan pada persamaan misi untuk membantu orang-orang dalam situasi bencana dan non-partisan kepentingan politik.

PARTISIPASI

Menurut Made Pidarta (Dwiningrum, 2009), partisipasi adalah keterlibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat menjadi mental dan keterlibatan emosional dan fisik dalam menggunakan semua kemampuan (inisiatif) dalam

semua kegiatan yang dilakukan dan untuk mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab bagi semua yang terlibat. Partisipasi adalah mental dan emosional keterlibatan orang dalam kelompok pengaturan yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan kelompok dan bertindak secara bertanggung jawab dengan memperhatikan denominasi. Partisipasi Huneryear dan Heoman (Dwiningrum, 2009) adalah keterlibatan mental dan emosional dalam situasi yang mendorong kelompok untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagi tanggung jawab dengan mereka.

Partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik proses juga penting sebagai refleksi dari prinsip-prinsip demokrasi. Hal itu menjadi tidak sesuai ketika partisipasi masyarakat yang kemudian menjadi salah satu prinsip yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk mencapai "good governance" (Adisasmita, 2006) partisipasi Masyarakat menurut Adi (2007) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan. Partisipasi ini berkembang bukan hanya tentang keterlibatan fisik, pikiran dan perasaan sendiri. Keterlibatan bisa lebih bervariasi seperti pikiran, tenaga, keahlian, barang dan uang. Menekankan partisipasi

masyarakat dalam "partisipasi" dari warga negara dalam pengambilan keputusan langsung kepada lembaga-lembaga dan proses pemerintahan. Gaventa dan Valderma (Dwiningrum, 2009) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi terhadap suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga negara dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di beberapa arena utama yang mempengaruhi kehidupan warga. Pengembangan konsep-konsep dan asumsi-asumsi dasar untuk mengambil ide dan praktek partisipasi masyarakat meliputi: menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi terhadap suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga negara dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di beberapa arena utama yang mempengaruhi kehidupan warga. Pengembangan konsep-konsep dan asumsi-asumsi dasar untuk mengambil ide dan praktek partisipasi masyarakat meliputi:

1. Partisipasi adalah hak politik yang melekat pada orang-orang serta hak-hak politik. Hak itu tidak hilang ketika ia memberikan mandat kepada orang lain untuk duduk di lembaga pemerintah. Sedangkan hak-hak politik, seperti hak asasi manusia, tetap melekat pada masing-masing individu yang bersangkutan.
2. Partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik di lembaga-lembaga formal yang mampu menutupi kegagalan demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan

masih memiliki beberapa kelemahan ditandai dengan keraguan sejauh mana orang-orang yang dipilih untuk mewakili kehendak rakyat.

3. Langsung partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik dapat mendorong partisipasi lebih bermakna.
4. Partisipasi ini dilakukan secara sistematis, bukan hal isidental.
5. Sehubungan dengan penerimaan desentralisasi sebagai instrumen yang mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Partisipasi masyarakat memiliki karakteristik yang proaktif dan reaktif bahkan orang-orang yang berpartisipasi penalaran berarti baru bertindak, ada kesepakatan yang dilakukan oleh semua yang terlibat, tidak ada tindakan yang mengisi perjanjian, tidak ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam kedudukan yang sama.

Saat di adanya bencana alam berusaha forum bersama-sama dengan pemerintah dan pihak-pihak lain untuk mendorong kemampuan masyarakat dan individu untuk menjadi meningkat. Kesempatan untuk meng-upgrade kemampuan baik perorangan maupun kelompok yang menjadi target kerja forum dimulai pada tahun 2017 sampai hari ini, dalam memberikan kesempatan yang lebih besar untuk relawan dan anggota masyarakat untuk mengasah keterampilan mereka.

Salah satu bentuk capacity building dengan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan pelatihan

relawan yang diadakan oleh Badan penanggulangan Bencana Daerah dan departemen-departemen atau lembaga-lembaga, termasuk pendidikan. Beberapa peran dan relawan keterlibatan masyarakat meliputi:

1. Psikososial pelatihan yang diselenggarakan oleh BPBD Sleman
2. Pertukangan pelatihan dalam bencana perpesktif dalam kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada
3. Tempat Penampungan sementara Pelatihan Manajemen dan Hunian Tetap yang diselenggarakan oleh BPBD Sleman
4. Pelatihan pemodelan rumah tahan gempa dalam kerjasama dengan Sarwidi Pusat
5. Pelatihan Pertolongan pertama dalam keadaan darurat pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Kabupaten Sleman Dinas Kesehatan.
6. *Water Rescue Training* yang diselenggarakan oleh Badan SAR Nasional Yogyakarta.
7. Pencarian Dan Penyelamatan Pelatihan yang diselenggarakan oleh SARDA DIY.

Posting Menejeman pelatihan yang diselenggarakan oleh BPBD Kabupaten Sleman.

Sementara itu, selama pembentukan Forum Komunikasi Relawan Sleman, ada banyak anggota masyarakat relawan yang terlibat dalam penanganan kejadian atau bencana alam di wilayah Kabupaten Sleman adalah: penanganan peristiwa pohon tumbang akibat angin kencang, penanganan insiden penanganan tanah

longsor, penanganan kejadian banjir akibat cuaca ekstrim, penanganan kejadian bencana kekeringan Sleman wilayah, penanganan peristiwa letusan freatik Gunung Merapi, penanganan kebakaran, kecelakaan lalu lintas adegan manajemen, penanganan lokasi kecelakaan terjebur ke sumur, penanganan insiden sungai, penanganan lokasi kecelakaan gantung diri, dan lain-lain sebagainya.

MITIGASI BENCANA DAN DILEMA KELEMBAGAAN RELAWAN

Bencana menurut UU No. 24 Tahun 2007 adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan yang disebabkan baik oleh faktor alam dan / atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan munculnya kehidupan manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Di dalam UU Nomor 24/2007 itu juga disebutkan bahwa kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat, dan efisien. Peringatan dini adalah serangkaian peringatan kepada publik secepat mungkin tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Dinyatakan juga bahwa hazard adalah suatu

kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menangani dampak buruk bahaya tertentu. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana dan kerentanan terancam bencana. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan periode waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Sementara mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kapasitas menghadapi ancaman bencana.

Mitigasi yang efektif harus memiliki tiga unsur utama, yaitu:

1. Penilaian bahaya (*Hazard Assessment*): diperlukan untuk mengidentifikasi populasi dan aset yang terancam, serta tingkat ancaman. Penilaian ini memerlukan pengetahuan tentang karakteristik bencana, data probabilitas bencana dan peristiwa bencana di masa lalu. Tahap ini menghasilkan Peta Potensi Bencana sangat penting dan dibutuhkan untuk bekerja di luar dua

- unsur lain dari mitigasi,
2. Peringatan (*Warning*): diperlukan untuk mengingatkan masyarakat tentang bencana yang akan mengancam. Sistem peringatan didasarkan pada data bencana yang terjadi sebagai peringatan dini serta menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk memberikan pesan kepada pemerintah dan masyarakat. Peringatan terhadap bencana yang akan mengancam harus dilakukan dengan cepat, benar, dan dapat dipercaya.
 3. Persiapan (*Preparedness*): kegiatan kategori ini tergantung pada unsur-unsur mitigasi sebelumnya (bahaya dan peringatan), yang membutuhkan pengetahuan tentang daerah yang kemungkinan akan terkena bencana dan pengetahuan tentang sistem peringatan untuk mengetahui kapan harus melakukan evakuasi dan kapan saatnya kembali ketika situasi telah aman kembali ,

Tingkat kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah sangat penting pada tahap ini untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi dampak bencana. Hal-hal yang perlu dipersiapkan, diperhatikan dan dilakukan bersama-sama oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam mitigasi bencana, antara lain:

1. Kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan kebencanaan atau mendukung langkah-langkah pencegahan bencana seperti tanah menggunakan kebijakan untuk tidak

membangun lokasi rawan bencana.

2. Lembaga Pemerintah yang menangani bencana, dimana kegiatannya mulai dari identifikasi daerah rawan bencana, penghitungan perkiraan dampak yang ditimbulkan oleh bencana, manajemen bencana, perencanaan, pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat pencegahan bencana.
3. Identifikasi lembaga-lembaga yang muncul dari inisiatif masyarakat yang menangani bencana koordinasi sehingga untuk mewujudkan pekerjaan yang baik.
4. Pelaksanaan program atau nyata actiongovernment merupakan pelaksanaan dari kebijakan yang ada, dan pencegahan.
5. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang fitur alam lokal yang menyediakan *indication of* ancaman bencana.

Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengatasi risiko bencana menjadi hal yang penting, termasuk melakukan pelatihan tanggap bencana atau simulasi yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menanggulangi risiko bencana. Pelatihan diselenggarakan melalui pola penyampaian pesan melalui teknik atau pola komunikasi tertentu. Menurut Djamarah (2004), pola komunikasi pola hubungan antara dua orang atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan cara yang tepat, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Dalam model komunikasi pola komunikasi Stephen P. Robbins menyatakan dalam bukunya, *Perilaku Organisasi: konsep,*

Kontroversi dan aplikasi. Second Edition, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey (1983). Karena ada lima model pola komunikasi dalam model komunikasi Robbins, yaitu model rantai (*chain*), model roda (*wheel*), model lingkaran (*circle*), model bebas (semua saluran), dan model huruf "Y"

1. Model rantai (*chain*) adalah modus yang menganut garis langsung dari link komunikasi (komando) baik ke atas atau ke bawah tanpa pergi ke garpu.
2. Model roda (*wheel*) adalah model pola komunikasi yang membuat semua laporan, instruksi perintah kerja dan pengawasan difokuskan pada satu pemimpin dengan empat atau lebih bawahan dan tidak ada interaksi
3. Model lingkaran (*circle*) adalah suatu model di mana semua anggota dan staf interaksi dapat terjadi pada masing-masing dari tiga tingkat hirarki.
4. Model gratis (*all channel*) adalah sebuah model pengembangan model lingkaran (*circle*). Model huruf "Y" adalah model dari pola-pola komunikasi yang tidak jauh berbeda dengan model rantai (*chain*), di mana ada tingkat hirarki (Rosady, 1998).

Tujuan dan fungsi dari Komunitas Relawan Forum Komunikasi ini adalah:

1. Realisasi relawan terampil, disiplin, dedikasi dan semangat yang tinggi dari Pancasila loyalitas

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Membantu usaha pemerintah dalam menangani situasi bencana.
3. Membantu pemerintah dalam hal ini Badan penanggulangan Bencana Daerah Sleman berbagai cluster bencana yang terjadi di wilayah Sleman.
4. Komunitas relawan Forum Komunikasi Sleman dalam kegiatannya berfungsi sebagai koordinasi dan peningkatan kapasitas relawan di masing-masing komunitas di kabupaten Sleman.

Forum komunikasi Masyarakat Relawan Sleman meliputi: membantu pemerintah dalam penanganan bencana, membantu pemerintah dalam pelaksanaan komunikasi darurat, melakukan upaya-upaya dalam rangka mendukung program organisasi, membantu orang-orang dalam pengurangan risiko bencana, kegiatan Forum Komunikasi Komunitas Relawan Sleman ada yang terbuka untuk umum atau tertutup untuk anggota forum komunitas relawan.

KEANGGOTAAN KOMUNITAS RELAWAN FORUM KOMUNIKASI SLEMAN

Komunitas Forum Komunikasi anggota Komunitas Relawan Sleman terdaftar di BPBD Sleman, yang secara langsung atau tidak langsung yang bergerak di bidang manajemen bencana. Relawan dan anggota masyarakat dan komunitas yang sudah terdaftar di Badan penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Sleman,

tidak secara otomatis terdaftar dalam Komunitas Relawan Forum Komunikasi Sleman. Secara eksplisit Komunitas Relawan Forum Komunikasi keanggotaan terbuka untuk relawan masyarakat Sleman di kabupaten Sleman yang telah memenuhi persyaratan.

Anggota Dewan Organisasi Forum Komunikasi Komunitas Relawan Slema tahun 2019-2021

1. Dewan Pengawas dan Penasehat: Bupati / Wakil Bupati Sleman
2. Presidium: Kepala Relawan Masyarakat
3. Ketua 1: Yoga Nugroho Utomo
4. Ketua 2: Sahlan Hasbi
5. Sekretaris 1: Paulinus Sukadarma
6. Sekretaris 2: Adris Rahji
7. Bendahara: Aris Hidayat
8. Hubungan Internal: Budi Budi Kurniawan & Rahmanto
9. Hubungan Eksternal: Handika Rahmawan & Eksan
10. Pendidikan dan Regenerasi: Agus Subekti
11. Koordinator Lapangan: Muhni Suhruri

Anggota komunitas relawan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Relawan Sleman terdiri dari : 53 relawan masyarakat, Lowo Penyelamatan Jogja, Komunitas Karbolo, Parelgo, Seyegan Penyelamatan, JME, Bagana, Sarana Komunikasi Bersama (SKB), PRB Melati, Pendowoharjo Masyarakat, Penyelamatan 920, Rescue 328, Penyelamatan Tabah, Relado, Rajawali

Masyarakat, Syarifhidayatullah, Profit, Harjo Masyarakat, Rekomendasi, Ragin Masyarakat, Pasak Merapi, Merapi, gemuk, Paksi Katon, Chakra, Muncar, SAR Linmas, Mercuri, Bagong Masyarakat, Korelasi, RMC, GPGW , Sembada, KKR Infocom, SKSB, KSM, AMC, FPB, BKL, Widodo Sosial Masyarakat, Djipatsong, Relawan Jogja Timur, Penyelamatan Taman, Prambanan Masyarakat, Bondowoso, Relawan, Berbah, LMC, Senkom Mitra Polri kabupaten Sleman, FKKPI Penyelamatan, Turgo Asri , Monjali Masyarakat, Sarsena.

Hingga 2019 ini komunitas yang tergabung dalam forum sebanyak 53 relawan masyarakat, dengan jumlah relawan sebanyak 2300 orang-orang yang sudah terdaftar dan menerima kartu keanggotaan yang dikeluarkan oleh Badan penanggulangan Bencana Daerah Sleman, hal ini tentunya masih diinventarisasi karena di Sleman memiliki sebanyak 17 kecamatan, dengan 86 desa dan 1212 dusun. Sebagai program pemerintah dalam upaya untuk jaminan keamanan atas risiko, relawan anggota yang telah tercatat dalam database akan memiliki jaminan yang termasuk dalam risiko kecelakaan kerja asuransi (BPJS). Saat ini para relawan yang telah menerima sebanyak 500 orang, hal ini disebabkan keterbatasan anggaran pemerintah.

PENUTUP

Secara umum, komunikasi organisasi telah berjalan dengan baik, hal ini karena informasi proses dilakukan sesuai dengan perjanjian dan menjadi prosedur tetap di forum serta komunitas relawan. Komunikasi dan informasi yang disampaikan dari papan untuk masyarakat

melalui forum dan komunitas ketua atau dewan relawan masyarakat dan kemudian menyalurkan informasi kepada anggota masyarakat, adalah sebuah proses yang ideal. Sejalan dengan model rantai (*chain*), yang menganut garis langsung dari link komunikasi (komando) baik ke atas atau ke bawah tanpa pergi ke garpu.

Sementara tantangan yang masih ada dan rekomendasi adalah tidak adanya keseluruhan peraturan organisasi dalam bentuk produk hukum forum ke forum, yaitu dalam bentuk surat keputusan dari pejabat pemerintah setempat. Hal ini telah menjadi sangat penting dan bermanfaat bagi organisasi masyarakat dalam membangun sistem terintegrasi antara pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan. Harapan masyarakat relawan yang masing-masing desa akan menjadi lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi ancaman bencana, atau peristiwa. Forum sebagai penghubung dengan sektor terkait kebijakan pemerintah akan lebih sinergi dalam pelayanan, manajemen bencana.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Isbandi Rukminto. 2007. *Aset-Perencanaan Berbasis Partisipasi Masyarakat; dari pemikiran untuk aplikasi*. Depok: fisip UI Press.

Aditya, Barry, et al.,. 2009. *Kesiapan dan kesiapsiagaan Bencana Semua (Manual untuk Aktivis Persyarikatan)*. Jakarta: Penerbit Risalah MDMC.

Arni Muhammad. 2009. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara

Ahdi, Didi. 2015. Melalui Pendekatan Penanggulangan Bencana Perencanaan Manajemen Risiko. *Jurnal Reformasi*. 5, (1), 13-30.

Badri, M. 2008. Memberdayakan Komunikasi Pemimpin Opini dalam Penanganan Bencana Gempa bumi di Yogyakarta (Bantul Kasus). *Jurnal Komunikasi Pembangunan*. 6 (1), 55-71.

Budi Setio. 2012. Bencana Komunikasi: Aspek Sistem (Koordinasi, Informasi, dan Kerjasama). *Jurnal ilmu Komunikasi*, Volume 1, Nomor 4, Januari 2012, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Brilian Aisyah Nadine Yang Narra, 2018. Pola-Pola komunikasi dari Badan penanggulangan Bencana Daerah di kabupaten Sleman Merapi penanggulangan Bencana (Penelitian Deskripsi Kualitatif tinggal permanen dongkelsari). *Skripsi*. UII. Yogyakarta

Cangara, Hafied.2005. *Pengantar Komunikasi* .Jakarta: Raja Grafindo

Effendy, Onong Uchjana. 2003. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

-----, 2017. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Kaswan 2012. *Manajemen Sumber daya manusia untuk Keunggulan Kompetitif Organisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Kriyantono, Rachmat. 2007. *Teknis Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Chief Executive SK No. 121 BPBD Sleman/Kep.Ka.Pelak.BPBD/2017 tentang Perubahan

atas Keputusan Kepala Pelaksana Bpbd Kabupaten Sleman No. 332 2016 Tentang BPBD Renstra Tahun 2016-2021

Lestari, Puji, 2012. Bencana Merapi Manajemen Komunikasi pada tahun 2010 pada saat Tanggap Darurat. *Jurnal ilmu Komunikasi*, Volume 10, Nomor 2, agustus 2012, halaman 173-197, Studi Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Imu UPN Yogyakarta.

Pariipurno, Eko Teguh 2008, Community Based Disaster Risk Management Alternatif Dari Bawah. *Jurnal Dialog Kebijakan Publik* Edisi 1 Juni Tahun II, 2008, Departemen Komunikasi dan informatika, Jakarta.

Sleman Peraturan daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pemerintah Daerah Sleman.

Kabupaten Sleman Perda No. 7 tahun 2013 tentang penanggulangan Bencana.

Pratminingsih, Sri Astuti. 2006. *Komunikasi Bisnis*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Oktari, Alia Risqi. Tahun 2017. Judicial Review atas Pelaksanaan penanggulangan Bencana Daerah di kabupaten Banjarnegara. *Skripsi*. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta.

Rencana Aksi Nasional 2015-2019 Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Riswandi, 2009. *Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Graha Ilmu.

Rosady, Ruslan. (1998). *Public Relations dan Manajemen Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wibowo, 2011. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Robbins, Stephen, P & Timothy A. Judge, 2008. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, Tentang Bencana

<https://m.detik.com/news/berita/d-3362491/mensos-khofifah-deklarasikan-yogyakarta-sebagai-kotarelawan>